

Pengaruh Penegakan Peraturan, Asimetri Informasi Dan Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Se-Kabupaten Karangasem)

I Gusti Ayu Putri Yuniantari¹, Putu Riesty Masdiantini²

^{1,2}Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

¹e-mail: yuniantariputri1@gmail.com, ²riesty.masdiantini@undiksha.ac.id

Abstrak

Kecenderungan kecurangan merupakan suatu keinginan atau tindakan yang disengaja dimana orang tersebut berperilaku tidak jujur untuk memperoreh keuntungan yang dapat merugikan orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penegakan peraturan, asimetri informasi dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah BUMDes se-Kabupaten Karangasem. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, dengan menggunakan sampel sebanyak 216 orang. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Data diperoleh dari penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. Data dianalisis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) penegakan peraturan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan, (2) asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan, dan (3) moralitas individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan.

Kata Kunci: kecenderungan kecurangan, penegakan peraturan, asimetri informasi dan moralitas individu

Abstract

The tendency of fraud is a deliberate desire or action in which the person behaves dishonestly to obtain benefits that can harm others. This study aims to determine the effect of law enforcement, information asymmetry and individual morality on the tendency of fraud. This type of research is quantitative research. The population used is BUMDes throughout Karangasem Regency. The sampling technique in this study used purposive sampling method, using a sample of 216 people. The data source used is primary data. Data were obtained from distributing questionnaires directly to respondents. Data were analyzed using multiple regression analysis. The results showed that; (1) enforcement of regulations has a negative and significant effect on the tendency of fraud, (2) asymmetry of information has a positive and significant effect on the tendency of fraud, and (3) individual morality has a negative and significant effect on the tendency of fraud.

Keywords: *tendency of cheating, enforcement of regulations, information asymmetry and individual morality*

PENDAHULUAN

Berbagai kasus baik di dalam negeri maupun di luar negeri menunjukkan bahwa kecurangan dapat terjadi dimana saja dan termasuk cukup besar di sektor usaha, hampir terjadi juga di sektor pemerintahan dan sektor swasta serta terjadi diberbagai perusahaan berskala kecil maupun berskala besar. Salah satu kecenderungan potensi kecurangan dapat terjadi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal dan

pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat (Kushartono, 2016). Tujuan BUMDes seperti dalam Permendesa PDT dan Transmigrasi No. 4/2015 adalah meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Sehingga dalam hal ini diperlukan pengelolaan dana yang tepat agar dana yang dialokasikan pada BUMDes dapat dikelola dengan bijak. Dalam pengelolaan tersebut diperlukan adanya pertanggungjawaban atas dana yang dikelola. Pengelolaan dana yang tepat pada BUMDes

akan menghindari adanya masalah pada BUMDes seperti kecurangan yang dapat merugikan masyarakat.

Dibalik kerasnya usaha pemerintah untuk memaksimalkan pengelolaan BUMDes, munculnya praktik-praktik kecenderungan kecurangan akuntansi yang masih banyak ditemukan dalam pengelolaan BUMDes. Dalam pengelolaan dana BUMDes banyak sekali ditemukan kasus kecurangan seperti dugaan penyelewengan dana maupun penyalahgunaan uang yang sengaja dilakukan oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab guna mendapatkan keuntungan untuk konsumsi pribadinya. Hal tersebut terjadi karena masih rendahnya kompetensi pengelola BUMDes serta lemahnya pengendalian internal sehingga menyebabkan ketidak efektifan serta ketidak efisienan dalam pengelolaan dana BUMDes yang berdampak pada pemborosan anggaran dalam dana desa.

Melihat hal tersebut, terdapat beberapa kasus penyelewengan dana BUMDes di Indonesia, yaitu diantaranya : (1) Penyelewengan anggaran BUMDes tahun 2017 dengan total kerugian Rp55.000.000 dengan tersangka utama Ketua BUMDes Tanjung Larang, Mandailing Natal (Startfmmadina.com, 2017). (2) Penyalahgunaan wewenang serta pidana korupsi Kepala Desa serta Ketua BUMDes Desa Bingkat, Sumatera Utara dengan total kerugian Rp 100.000.000 pada tahun 2018 (Indahsuaranews.com, 2018). (3) Penyelewengan dana pendapatan BUMDes Maribaya dengan total kerugian 800.000.000 pada tahun 2019 (Satelit post.com, 2019). (4) Penyelewengan dana BUMDes Desa Sumberjo, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lambingan tahun 2019 yang mengakibatkan kerugian kurang lebih Rp786.513.000 (Faktualnews.co, 2020), (5) Dugaan penyelewengan dana BUMDes Desa Galang Suka, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp205.700.000 (Medanbicara.com, 2021).

Selain kasus yang terjadi di Indonesia di Provinsi Bali sendiri terdapat beberapa kasus kecurangan pada BUMDes, yaitu: (1) BUMDes Gema Matra, Desa Pucak Sari yang berada di Kecamatan Busungbiu ditemukan kerugian Rp.

389.000.000, pengurus diduga telah membuat laporan fiktif pada pertanggung jawaban usaha tersebut (NusaBali, 2018). (2) Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Kertha Jaya di Besan terdapat kredit fiktif yang uangnya diduga diselewengkan pengurus Bumdes senilai Rp 645.000000 (Tribun-bali.com, 2019). (3) Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng telah melakukan penyimpangan pengelolaan dana BUMDes sebesar Rp 1,2 miliar (Metrobali.com, 2019). (4) Dugaan kasus penyalahgunaan dana BUMDes di Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar, Buleleng yang dilakukan oleh ketua pengurus BUMDes dengan kerugian yang ditafsirkan mencapai sebesar Rp87.634,72 rupiah berdasarkan PKN dari pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng. (Balipuspanews, 2021).

Dari kasus tersebut membuktikan bahwa, masih banyak permasalahan kecurangan yang terjadi pada badan usaha yang dapat menghambat operasional perusahaan. Di Provinsi Bali yang terdiri dari sembilan kabupaten, salah satunya di kabupaten Karangasem sudah terbentuk sebanyak 72 BUMDes dari 75 desa yang ada di Kabupaten Karangasem. Sisanya yaitu 3 Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMKel). Adapun kasus kecurangan yang terjadi di Kabupaten Karangasem yaitu: (1) BUMDes Kuncara Giri yang terdapat di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem terdapat penyelewengan dana kurang lebih Rp. 800.000.000 yang dilakukan oleh pihak pengurus BUMDes yang mulai mencuat tahun 2019 (Balifactualnews.com, 2021), (2) BUMDes Tianyar Tengah pada tahun 2020 terjadi kasus kecurangan dana BUMDes yang dilakukan pihak pengurus BUMDes yang mengakibatkan tidak aktifnya BUMDes Tianyar Tengah sampai sekarang (2021). (3) BUMDes Kertha Buana pada tahun 2020 terdapat kasus kecurangan yang dilakukan oleh pengurus BUMDes yang mengakibatkan macetnya keuangan BUMDes sehingga kepengurusan BUMDes tahun 2021 belum terbentuk. Selain kasus tersebut menurut data yang diperoleh dari DPMD Kabupaten Karangasem terdapat 49 BUMDes dari 72 BUMDes di Kabupaten Karangasem yang terlambat melakukan pelaporan laporan keuangan pada tahun 2020. Hal ini membuktikan bahwa kurangnya keterampilan

para pengurus dalam melaksanakan tugasnya serta dari sanalah dapat menimbulkan permasalahan yang dapat membuka peluang untuk melakukan praktik-praktik kecurangan.

Tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan. 2) Untuk mengetahui pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan dan 3) Untuk mengetahui pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan.

Grend theory yang mendasari penelitian ini yaitu menggunakan *fraud diamond theory*. *Fraud diamond theory* merupakan empat elemen yang dapat menimbulkan adanya kecurangan. *Fraud diamond theory* terdiri dari *pressure* (tekanan), *opportunity* (peluang), *rationalization* (rasionalisasi) dan *capability* (kemampuan).

Banyak faktor yang mempengaruhi adanya kecenderungan kecurangan salah satunya penegakan peraturan (Najahningrum, 2013). Penegakan peraturan merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma peraturan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan aturan-aturan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Marsini et al., 2019). Menurut Sujana et al. (2019) berdasarkan teori *fraud diamond* penegakan peraturan termasuk kedalam bagian *opportunity*, karena jika penegakan peraturan itu rendah didalam suatu organisasi maka akan memberikan kesempatan atau peluang seseorang untuk melakukan kecurangan. Untuk dapat meminimalisir pelanggaran atas peraturan yang berlaku, maka harus ada penegakan peraturan yang tegas dalam lingkungan organisasi tersebut.

Penelitian mengenai penegakan peraturan pernah diteliti oleh Yudistira (2017), Cahyadi (2020) dan Sari (2020), yang menemukan bahwa penegakan peraturan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Sedangkan penelitian Rizky (2017) menunjukkan bahwa penegakan peraturan berpengaruh terhadap

kecurangan. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H₁: Penegakan Peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan, yaitu asimetri informasi (Najahningrum, 2013). Menurut Gayatri (2017) asimetri informasi merupakan situasi dimana terjadi ketidakselarasan informasi antara pihak yang memiliki atau menyediakan informasi dengan pihak yang memerlukan informasi. Asimetri informasi berhubungan dengan teori *fraud diamond* pada bagian *opportunity* (peluang) dan teori *fraud diamond* pada bagian *capability* (kemampuan yang dimiliki seseorang yang memungkinkan melakukan *fraud*). Asimetri informasi merupakan salah satu bentuk peluang yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kecurangan dan kemampuan yang dimiliki seseorang yang memungkinkan untuk melakukan kecurangan berulang kali tidak hanya sekali. Asimetri informasi terjadi karena agen lebih menguasai informasi dibandingkan dengan pihak lain (pemilik). Untuk dapat meminimalisir asimetri informasi dalam suatu organisasi yaitu dengan melakukan pengawasan yang rutin pada BUMDes agar seluruh pengurus BUMDes memiliki rasa tanggungjawab terhadap tugasnya masing-masing.

Penelitian mengenai asimetri informasi pernah diteliti oleh Dewi (2018), Gayatri (2017) dan Lestari (2017), yang menemukan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Sedangkan penelitian Giarini (2015) menunjukkan bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H₂: Asimetri Informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan.

Selain itu faktor lain yang dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan yaitu tingkat moralitas individu yang ada dalam suatu organisasi (Udayana, 2017). Moralitas individu merupakan kemampuan individu dalam menyelesaikan dilema etika.

Berdasarkan teori *fraud diamond* moralitas individu termasuk ke dalam bagian *rationalization* (rasionalisasi). Rasionalisasi yaitu adanya sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan *fraud*. Orang yang memiliki level penalaran moral yang rendah berperilaku berbeda dengan orang yang memiliki level penalaran moral yang tinggi ketika menghadapi dilema etika. Semakin tinggi tingkat sirkulasi moral seseorang, semakin besar kemungkinan individu tersebut melakukan hal yang benar. Dengan adanya moralitas individu yang tinggi dari setiap kepengurusan BUMDes maka akan menurunkan kecenderungan kecurangan.

Penelitian terkait moralitas individu pernah dilakukan oleh Saputra (2015), Yadnya (2017) dan Sari (2020), yang menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Hal ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Jayanti (2019) diperoleh hasil bahwa moralitas individu berpengaruh positif terhadap kecurangan. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H₃: Moralitas Individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2013) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Adapun variabel yang digunakan yaitu penegakan peraturan, asimetri informasi dan moralitas individu. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan

tertentu. Kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini adalah seluruh pengurus BUMDes yang berstatus sebagai ketua, sekretaris dan bendahara yang berkaitan pada bagian pengelolaan BUMDes. Berdasarkan tabel dan kriteria di atas pengambilan sampel yaitu 216 orang pengurus di seluruh BUMDes yang ada di Kabupaten Karangasem dari jumlah total populasi sebanyak 439 orang. Jadi jumlah total sampel untuk 72 BUMDes yang ada di Kabupaten Karangasem adalah 216 orang.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner secara langsung untuk menyerahkan ataupun mengambil kembali kuesioner agar dapat dilakukan pengolahan data. Kuesioner yang diberikan terdiri dari beberapa pertanyaan sesuai dengan indikator setiap variabel yang akan disebarkan secara langsung ke masing-masing BUMDes di Kabupaten Karangasem. Dalam penelitian ini, kuesioner yang digunakan adalah kuesioner dengan jenis pertanyaan tertutup, dimana responden menjawab setiap pernyataan yang diukur dengan menggunakan skala *likert*. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) analisis statistik deskriptif; (2) pengujian kualitas data meliputi uji validitas dan reliabilitas; (3) pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas; (4) pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, dan uji t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah kuesioner yang disebarkan setara dengan jumlah angket yang kembali. Dalam melakukan penyebaran kuesioner terdapat 8 BUMDes dari 72 BUMDes yang tidak menerima pengisian kuesioner dan BUMDes yang tidak aktif pada tahun 2021 sehingga kuesioner yang disebarkan hanya ke-64 BUMDes di Kabupaten Karangasem yaitu sejumlah 192 kuesioner atau 100%. Seluruh kuesioner yang diterima tidak ada yang cacat dan telah diisi secara lengkap oleh responden, sehingga kuesioner bisa diolah semua yaitu berjumlah 192 kuesioner atau 100%. Kuesioner terdiri dari 25 butir pernyataan yang terdiri dari 9 butir pernyataan untuk variabel kecenderungan kecurangan (Y), 5 butir

pernyataan untuk variabel penegakan peraturan (X_1), 5 butir pernyataan untuk variabel asimetri informasi (X_2), dan 6 butir pernyataan untuk variabel moralitas individu (X_3).

Adapun profil responden dalam penelitian ini yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, pendidikan terakhir, jabatan, dan masa kerja dari 192 responden yang diteliti. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yaitu 117 responden laki-laki (60,94%) dan 75 responden perempuan (39,06%). Berdasarkan pendidikan terakhir menunjukkan bahwa pendidikan terakhir SMA/SMK sebanyak 118 responden (61,45%), pendidikan terakhir Diploma sebanyak 14 responden (7,30%), dan pendidikan terakhir Sarjana sebanyak 60 responden (31,25%). Selanjutnya berdasarkan jabatan responden menunjukkan bahwa 64 responden (33,33%) memiliki jabatan Ketua BUMDes, 64 responden (33,33%) memiliki jabatan Sekretaris BUMDes dan 64 responden (33,33%) memiliki jabatan Bendahara BUMDes. Kemudian berdasarkan masa kerja responden, yakni terdapat 6 responden (3,12%) memiliki masa kerja < 1 tahun, 23 responden (11,98%) memiliki masa kerja 1-2 tahun, 63 responden (32,81%) memiliki masa kerja 2-5 tahun, 68 responden (35,42%) memiliki masa kerja 5-10 tahun, dan 32 responden (16,67%) memiliki masa kerja > 10 tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden memiliki masa kerja 5-10 tahun.

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel penegakan peraturan (X_1) memiliki skor minimum 15 dan skor maksimum 25, serta skor rata-rata 19,86 dengan standar deviasi 2,76. Variabel asimetri informasi (X_2) memiliki skor minimum 12 dan skor maksimum 20, serta skor rata-rata 16,14 dengan standar deviasi 2,25. Variabel moralitas individu (X_3) memiliki skor minimum 21 dan skor maksimum 30, serta skor rata-rata 25,97

dengan standar deviasi 2,59. Variabel kecenderungan kecurangan (Y) memiliki skor minimum 12 dan skor maksimum 26, serta skor rata-rata 19,69 dengan standar deviasi 3,31.

Uji validitas bertujuan untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner yang digunakan (Ghozali, 2011). Uji validitas dilakukan setiap butir pertanyaan pada kuesioner dengan menggunakan analisis item yang mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah setiap skor butir. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi *Pearson's Correlation* dengan bantuan program *SPSS 24.0 for Windows*. Kriteria keputusan valid dinyatakan apabila nilai signifikansi (*Sig.*) < $\alpha = 0,05$ (Ghozali, 2011). Hasil uji validitas yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai signifikansi (*Sig.*) untuk semua item lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ sehingga seluruh item pernyataan pada kuesioner penegakan peraturan, asimetri informasi, moralitas individu, dan kecenderungan kecurangan dinyatakan valid.

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi perolehan jawaban responden. Nilai suatu instrumen dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70 (Ghozali, 2011). Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kuesioner penegakan peraturan, asimetri informasi, moralitas individu, dan kecenderungan kecurangan adalah reliabel.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2013). Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Uji normalitas data dilakukan pada *unstandardized residual* pengaruh penegakan peraturan, asimetri informasi, dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan. Hasil uji normalitas data tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N	192
Kolmogorov-Smirnov Z	0,049
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 1, ditunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200. Nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* tersebut lebih besar dari 0,05 untuk statistik *Kolmogorov-Smirnov Z*. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data berdistribusi normal.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel bebas yang satu dengan variabel yang lainnya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi di antara variabel bebas. Uji multikolinieritas dapat diuji dengan menggunakan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Hasil uji multikolinieritas disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Penegakan peraturan	0,784	1,275	Bebas multikolinieritas
Asimetri informasi	0,636	1,573	Bebas multikolinieritas
Moralitas individu	0,698	1,434	Bebas multikolinieritas

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa nilai VIF dari masing-masing variabel bebas lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,10. Nilai korelasi di antara variabel bebas dapat dikatakan mempunyai korelasi yang lemah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di antara variabel bebas tidak ada korelasi atau tidak terjadi multikolinieritas pada model regresi linier.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2013). Pada penelitian ini, untuk menguji heteroskedastisitas menggunakan uji *Glejser*. Ringkasan hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	t	Sig.
1 Penegakan peraturan	-0,964	0,336
Asimetri informasi	-1,091	0,277
Moralitas individu	-1,504	0,134

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa nilai signifikansi antara variabel bebas dengan *absolute residual (ABS)* lebih besar dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat adanya gejala heteroskedastisitas.

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk memprediksi berubahnya nilai variabel tertentu apabila variabel lain berubah (Sugiyono, 2013). Apabila varian

dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dapat diketahui persamaan garis regresi dengan menggunakan analisis konstanta dan koefisien beta. Hasil perhitungan konstanta dan koefisien beta serta hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Analisis Koefisien Beta dan Uji t

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients B</i>	<i>Standardized Coefficients Beta</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
1 (Constant)	28,658		11,197	0,000
X ₁	-0,281	-0,235	-5,433	0,000
X ₂	0,615	0,418	8,724	0,000
X ₃	-0,513	-0,402	-8,780	0,000

Sumber : Data diolah, 2021

Keterangan: X₁ = penegakan peraturan, X₂ = asimetri informasi, X₃ = moralitas individu, dan Y = kecenderungan kecurangan

Berdasarkan perhitungan regresi linier berganda pada Tabel 4, maka didapat hasil persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

$$Y = 28,658 - 0,281X_1 + 0,615X_2 - 0,513X_3 + \varepsilon$$

Berdasarkan model regresi yang terbentuk, dapat diinterpretasikan hasil sebagai berikut. Konstanta 28,658 menunjukkan bahwa apabila variabel X₁, X₂ dan X₃ bernilai konstan, maka variabel Y memiliki nilai positif 28,658 satuan. X₁ memiliki koefisien regresi -0,281. Nilai koefisien regresi yang negatif menunjukkan bahwa X₁ berpengaruh negatif terhadap Y. Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan X₁ dapat menurunkan Y sebesar 0,281 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap. X₂ memiliki koefisien regresi 0,615. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa X₂ berpengaruh positif terhadap Y. Hal ini

menggambarkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan X₂ dapat meningkatkan Y sebesar 0,615 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap. X₃ memiliki koefisien regresi -0,513. Nilai koefisien regresi yang negatif menunjukkan bahwa X₃ berpengaruh negatif terhadap Y. Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan X₃ dapat menurunkan Y sebesar 0,513 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap.

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), yang ditunjukkan dengan nilai *Adjusted R Square*. Pada penelitian ini menggunakan nilai dari *Adjusted R Square* karena dalam *Adjusted R Square* adalah koefisien determinasi yang disesuaikan untuk regresi yang menggunakan 3 atau lebih variabel independen dan dapat digunakan untuk mengevaluasi model regresi mana yang terbaik (Ghozali, 2013). Hasil analisis koefisien determinasi dapat disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Koefisien Determinasi

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
1	0,852	0,725	0,721

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 5, diketahui bahwa koefisien determinasi sebesar 0,721. Hal ini menunjukkan bahwa 72,1% variabel kecenderungan kecurangan dipengaruhi oleh variabel penegakan peraturan, asimetri informasi, dan moralitas individu, sedangkan 27,9% dipengaruhi oleh faktor lain.

Uji t digunakan untuk menentukan analisis pengaruh penegakan peraturan,

asimetri informasi, dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan secara parsial, dimana dapat dilihat dari besarnya nilai probabilitas pada uji t. Sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, maka berdasarkan Tabel 4. hasil pengujian hipotesis sebagai berikut. Penegakan peraturan (X₁) memiliki nilai signifikansi 0,000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H₀ ditolak. Jadi, dapat disimpulkan

bahwa penegakan peraturan (X_1) berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (Y). Asimetri informasi (X_2) memiliki nilai signifikansi 0,000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi (X_2) berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (Y). Moralitas individu (X_3) memiliki nilai signifikansi 0,000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa moralitas individu (X_3) berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (Y).

PEMBAHASAN

Pengaruh Penegakan Peraturan Terhadap Kecenderungan Kecurangan

Hasil pengujian hipotesis pertama mengenai pengaruh penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan menunjukkan nilai koefisien regresi -0,281 dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,000. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Jika penegakan peraturan semakin baik, maka kecenderungan kecurangan semakin rendah.

Berdasarkan teori *fraud diamond*, penegakan peraturan berkaitan dengan teori *fraud diamond* bagian *opportunity*. Peluang (*opportunity*) yaitu kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang melakukan tindakan tidak jujur. Tindakan tersebut biasanya terjadi karena adanya pengendalian internal instansi yang lemah, kurangnya pengawasan dan atau penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini penegakan peraturan dalam suatu organisasi dapat mempengaruhi kesempatan terjadinya kecurangan yang diakibatkan dari tinggi atau rendahnya penegakan peraturan tersebut dilaksanakan (Yudistira, 2017).

Berdasarkan data penilaian responden pada BUMDes di Kabupaten Karangasem, penegakan peraturan yang dilaksanakan masih kurang dimana masih terdapat pegawai yang tidak patuh terhadap

peraturan yang ada. Hal ini terlihat dari sebagian besar jawaban responden setuju dan sangat setuju untuk indikator penegakan peraturan pada kuesioner pertanyaan $X_{1.1}$ dengan jumlah responden yang menjawab setuju sebanyak 100 orang dan sangat setuju sebanyak 50 orang. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan peraturan yang masih kurang akan menimbulkan peluang untuk melakukan kecurangan. Sebaliknya, dengan semakin tinggi kepatuhan pengurus BUMDes terhadap penegakan peraturan yang berlaku, maka kesempatan terjadinya kecenderungan kecurangan pada BUMDes akan semakin rendah.

Kajian empiris yang turut mendukung temuan penelitian ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Yudistira (2017), yang menemukan bahwa penegakan peraturan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian Cahyadi (2020) penegakan peraturan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiyana (2016), Rizky (2017) dan Didi (2018) Didi yang diperoleh hasil bahwa penegakan peraturan berpengaruh terhadap kecurangan.

Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan

Hasil pengujian hipotesis kedua mengenai pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan menunjukkan nilai koefisien regresi 0,615 dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,000. Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan. Jika asimetri informasi semakin tinggi, maka kecenderungan kecurangan semakin tinggi.

Asimetri informasi merupakan salah satu bentuk peluang yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kecurangan dan kemampuan yang dimiliki seseorang yang memungkinkan untuk melakukan kecurangan berulang kali tidak hanya sekali. Sehingga berdasarkan teori *fraud diamond*, asimetri informasi berhubungan dengan teori *fraud diamond* bagian *opportunity* dan *capability*. *Opportunity*

merupakan peluang dan *capilability* merupakan kemampuan seperti posisi yang dimiliki oleh seseorang dalam organisasi dapat memberikan suatu kemampuan untuk melakukan kecurangan, jika pegawai tersebut cukup pintar untuk menemukan dan mengerti kelemahan pengendalian internal organisasi maka dapat menyalahgunakan posisinya untuk melakukan tindakan kecurangan yang dapat merugikan organisasi. Asimetri informasi terjadi karena manajer lebih menguasai informasi dibandingkan dengan pihak lain (pemilik atau pemegang saham). Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan asimetri informasi yang dimilikinya akan mendorong agen dengan pemilik (*principal*) memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manipulasi laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Lestari (2017), yang menyatakan bahwa asimetri informasi dapat menyebabkan tindakan kecurangan dimana hal ini biasanya dilakukan oleh pegawai yang memiliki kedudukan tertentu. Berdasarkan kondisi yang diamati di lapangan dan data penilaian responden pengurus BUMDes di Kabupaten Karangasem, di dapat bahwa asimetri informasi pada BUMDes Kabupaten Karangasem berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan dengan terjadinya asimetri informasi maka akan menimbulkan tindakan kecurangan dari para pengurus BUMDes. Hal ini dapat diketahui dari pengurus BUMDes dalam melaksanakan tugasnya dimana informasi mengenai aktivitas kerja yang menjadi tanggungjawabnya hanya pihak tertentu saja yang mengetahuinya. Sehingga dari kondisi yang diamati di lapangan, terjadinya kasus kecurangan pada BUMDes disebabkan oleh asimetri informasi antar pengurus BUMDes.

Kajian empiris yang turut mendukung temuan penelitian ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2018), yang menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian

Gayatri (2017) dan Lestari (2017), yang menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan. Adapun penelitian yang tidak sesuai dengan hasil penelitian tersebut yaitu penelitian yang dilakukan oleh Giarini (2015), Setiawan (2015) dan Reni (2019) yang diperoleh hasil bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan.

Pengaruh Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan

Hasil pengujian hipotesis ketiga mengenai pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan menunjukkan nilai koefisien regresi -0,513 dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,000. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Jika moralitas individu semakin baik, maka kecenderungan kecurangan semakin rendah.

Pada penelitian ini, berdasarkan teori *fraud diamond* bagian *rationalization* (rasionalisasi) berkaitan dengan moralitas individu. Menurut ahli Liyanarachchi dan Newdick (dalam Wijaya, 2021) moralitas individu merupakan kemampuan individu dalam menyelesaikan dilema etika yang dapat mempengaruhi perilaku etis mereka. Rasionalisasi yaitu adanya sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan *fraud*. Menurut Parmini et al. (2017) seseorang yang memiliki moral yang rendah akan melakukan kecurangan dan selalu berusaha menyembunyikan perbuatannya dengan cara mencari-cari alasan untuk menenangkan perasaan yang bersangkutan agar tidak menimbulkan ketakutan dalam dirinya berbeda dengan seseorang yang memiliki moral yang tinggi. Sehingga semakin tinggi tingkat sirkulasi moral seseorang, semakin besar kemungkinan individu tersebut melakukan hal yang benar.

Hasil penelitian ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Suryaningtyas (2016), yang menyatakan bahwa level penalaran moral individu akan mempengaruhi perilaku etis mereka. Orang dengan level penalaran moral yang rendah berperilaku berbeda dengan orang

yang memiliki level penalaran moral yang tinggi ketika menghadapi dilema etika. Berdasarkan data penilaian responden pada BUMDes di Kabupaten Karangasem, sebagian besar responden memiliki moral yang tinggi. Hal ini terlihat dari sebagian besar jawaban responden dengan jumlah 136 orang yang menjawab setuju dan 46 orang menjawab sangat setuju, salah satunya untuk indikator moralitas individu pada kuesioner pertanyaan $X_{3.4}$ yaitu menyusun laporan keuangan seperti periode yang lalu, karena sudah menjadi kelaziman di suatu instansi. Ini menunjukkan bahwa moralitas terjadi apabila orang mengambil yang baik karena sadar akan tanggungjawab dan kewajibannya bukan karena hanya untuk mencari keuntungan. Dengan adanya moralitas individu yang tinggi dari setiap kepengurusan BUMDes maka akan menurunkan kecenderungan kecurangan.

Kajian empiris yang turut mendukung temuan penelitian ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2015), yang menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian Yadnya (2017) dan Sari (2020), yang menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Hal ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Jayanti (2019), Rahmah (2018) dan Kusmawati (2016) diperoleh hasil bahwa moralitas individu berpengaruh positif terhadap kecurangan.

Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan adanya pengaruh penegakan peraturan, asimetri informasi, dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan, maka implikasi penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Hasil ini mengandung implikasi agar pemerintah desa tegas menerapkan aturan berupa sanksi jika

ada pegawai yang melakukan pelanggaran peraturan.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan. Hal ini mengandung implikasi agar dilakukan kegiatan pengawasan yang rutin misalnya pada saat kegiatan rapat pegawai diminta untuk mengungkapkan secara detail informasi kondisi kerjanya. Hal ini dilakukan agar informasi mengenai aktivitas kerja pada masing-masing pegawai juga diketahui oleh atasan/rekan kerja.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Hasil ini mengandung implikasi agar pemerintah desa melaksanakan kegiatan *Dharma Wacana* dengan melibatkan pegawai sebagai peserta. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas moral pegawai melalui wejangan-wejangan ajaran agama, sehingga dapat meminimalisir kecenderungan kecurangan akuntansi

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan pengaruh penegakan peraturan, asimetri informasi, dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan, yang ditunjukkan dengan koefisien regresi yang negatif -0,281 dengan nilai signifikansi uji t 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$.
2. Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan, yang ditunjukkan dengan koefisien regresi yang positif 0,615 dengan nilai signifikansi uji t 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$.
3. Moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan, yang ditunjukkan dengan koefisien regresi yang negatif -0,513 dengan nilai signifikansi uji t 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$.

Saran

Berdasarkan hasil, pembahasan dan simpulan, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut. Pertama bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Karangasem, perlu diperhatikan terkait penegakan peraturan, asimetri informasi, dan moralitas individu, sehingga pegawai dapat bekerja lebih disiplin, transparan dan akuntabel serta memiliki moral yang baik dalam melaksanakan pekerjaan. Hal ini diharapkan meminimalisir kecenderungan kecurangan.

Kedua, hasil penelitian menunjukkan koefisien determinasi sebesar 0,721, artinya variabel kecenderungan kecurangan dipengaruhi oleh variabel penegakan peraturan, asimetri informasi, dan moralitas individu sebesar 72,1%, sedangkan sisanya 27,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Oleh karena masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan, maka bagi peneliti selanjutnya disarankan agar menambahkan variabel bebas lain seperti tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan kemampuan karena berdasarkan fenomena kecurangan yang terjadi apakah variabel tersebut mempengaruhi kecenderungan untuk melakukan kecurangan. Ketiga, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah populasi penelitian, yaitu dengan menambah jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak hanya yang berada di Kabupaten Karangasem saja, sehingga diperoleh hasil penelitian yang tingkat generalisasinya lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Risqi, Ardiyana, Komala, Ardianingsih, A. (2016). Analisis Faktor-Faktor Penentu Kecurangan (Fraud). *Litbang Kota Pekalongan*, 10, 1–10. <https://jurnal.pekalongankota.go.id/index.php/litbang/article/viewFile/39/37>

Cahyadi, M. F., & Sujana, E. (2020). Pengaruh Religiusitas, Integritas, dan Penegakan Peraturan Terhadap Fraud pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 136.

<https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25919>

Dewi, K. Y. D., Dewi, P. E. D. M., & Sujana, E. (2018). Pengaruh Bystander Effect, Whistleblowing, Asimetri Informasi dan Religiusitas Terhadap Kecenderungan Kecurangan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kecamatan Busungbiu. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 9(2), 1689–1699.

Didi, D., & Kusuma, I. C. (2018). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Pemerintahan Daerah Kota Bogor. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 15(1), 1–20. <https://doi.org/10.21002/jaki.2018.01>

Gayatri, N., Yuniarta, G. A., & Prayudi, M. A. (2017). Pengaruh Kepuasan Kompensasi, Asimetri Informasi, Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Terjadinya Kecurangan (fraud) dalam Organisasi (Studi Empiris pada Organisasi Sektor Publik di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Akuntansi*, 8(2).

Ghozali, I. (2011). Aplikasi multivariate dengan program IBM SPSS 19. In *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.

Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. In *Information Technology* (Vol. 2, Issue 2).

Informasi, J., Wijaya, W. R., Soedirman, U. J., & Tengah, J. (2021). *the Influence of Compensation Suitability , Effectiveness of Internal Control , and Individual*. 16(1), 101–118.

Jayanti, L. S. I. D., & Suardana, K. A. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas, Whistleblowing dan SPI Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(3), 1117. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i03.p16>

Kushartono, E. W. (n.d.). *PENGEMBANGAN*

- DESA MANDIRI MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)* Fitri Arianti Universitas Diponegoro Semarang.
- Kusmawati, Y. (n.d.). *PENGARUH MORALITAS INDIVIDU DAN KOMPENSASI*. 1, 754–770.
- Marsini, N. L. Y., Sujana, E., & Wahyuni, M. A. (2019). Pengaruh Moralitas Individu, Internal Control System, Dan Penegakan Hukum Terhadap Kecenderungan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan BUMD Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi Profesi I*, 10(2), 76–88.
- Najahningrum, A. F. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi fraud: persepsi pegawai. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 259–267. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj%0AFAKTOR-FAKTOR>
- Parmini, N. W., Yasa, I. N. P., & Herawati, N. T. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal , Ketaatan kepada Aturan Akuntansi dan Kepuasan Kerja terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Gianyar. *E-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–11.
- Rahmah, R. N., & Haryoso, P. (2018). Pengaruh Moralitas Individu, Efektifitas Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, Ketaatan Aturan Akuntansi, Dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *E-Journal Stie Aub*, 5(2), 33–41. <https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/advance/article/view/414>
- Reni Anggriani, Syahril Djaddang, D. (2019). Antecedent Karakteristik Pengelola Keuangan Daerah Terhadap Kecenderungan Perilaku Fraud Dengan Asimetri Informasi dan Komitmen Organisasi sebagai sebagai Moderasi (Studi Pada Pegawai Pemerintah Kota Sukabumi). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 7, 48.
- Rizky, M., & Fitri, F. A. (2017). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Penegakan Hukum, dan Perilaku Tidak Etis terhadap Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(2), 10–20.
- Setiawan, M. D., Adi, Adiputra, I. M. A. P., & Yuniarta, G. A. (2015). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Asimetri Informasi, dan Keadilan Organisasi Terhadap Kecurangan (Fraud) (Studi Empiris pada Bank Perkreditan Rakyat Se-Kabupaten Buleleng). *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1), 1–8.
- Sugiyono. (2013). Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). In *Bandung: Alfabeta*.
- Sujana, E., Yasa, I. N. P., & Wahyuni, M. A. (2019). *Testing of Fraud Diamond Theory Based on Local Wisdom on Fraud Behavior*. 69(Teams 2018), 12–15. <https://doi.org/10.2991/teams-18.2019.3>
- Udayana, U. (2017). *I Nyoman Wijana Asmara Putra 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia*. 928–942.
- Yudistira, I Gusti Agung Ngurah Rahma. (2017). Pengaruh Aspek Tekanan, Penegakan Peraturan, Rasioanlisasi, Dan Wewenang Pegawai Terhadap Fraud (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Karangasem). *Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Yadnya, Made Dwi Kusuma, (2017). Pengaruh Moralitas Individu, Efektivitas Sistem Pengendalian Internal, Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) (Studi Kasus Pada KSP Kecamatan Buleleng). *Skripsi. Jurusan Akuntansi Program S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha*.